

# **LAPORAN PENELITIAN**



**Judul Penelitian:**

**KEBIJAKAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BUNGO  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Oleh:**

**Dr. Sesarria Yuvanda, SP, ME  
Siswoyo, SE, MSi**

**Dibiayai oleh:**

**Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI**

**TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Pada Masa Pandemi Covid-19
2. Peserta Program : Penelitian Internal
3. Tim Penelitian
  - a) Ketua Tim Peneliti
    - a. Nama : Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME
    - b. NIDN : 1001077601
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
  - b) Anggota Peneliti
    - a. Nama : Siswoyo, SE., MSi
    - b. NIDN : 1022017301
    - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
4. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jambi
5. Lama Penelitian : 7 Bulan
6. Biaya Total Penelitian : 2.500.000,-
  - Dana Internal : 1.500.000,-
  - Dana Eksternal : 1.000.000,-

Mengetahui,  
Ka Prodi Ekonomi Pembangunan

(Ratih Rosita, SE, MSi)  
NIDN. 1011118603

Jambi, 30 Juli 2022  
Peneliti,

  
(Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME)  
NIDN. 1001077601

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi

**(Prima Audia Daniel , SE, ME)**  
NIDK.8852530017

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Tercatat tahun 2019 penerimaan asli daerah di seluruh Indonesia sebesar 169.993 milyar rupiah dan turun menjadi 148.711 milyar rupiah pada tahun 2020. Artinya PAD pada masa pandemic Covid 19 terjadi penurunan sebesar 12,51 %.

Kondisi penerimaan PAD yang tergambar di Indonesia tidak jauh berbeda untuk provinsi Jambi. Penerimaan PAD Provinsi Jambi pada tahun 2019 sebesar 1,651 trilyun namun pada tahun 2020 PAD provinsi Jambi menurun menjadi 1,535 trilyun yang artinya terjadi penurunan PAD sebesar 3.83 %.

Dampak pandemic Covid-10 juga dirasakan oleh kabupaten Bungo dimana tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bungo mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19. Covid-19. Penerimaan PAD kabupaten Bungo ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dalam Situasi  
Pra- Pasca Pandemi Covid-19 Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah ( Juta Rupiah)	Perkembangan
1	2018	Rp. 133.848,46	-26,91%
2	2019	Rp. 140.327,48	4,84%
3	2020	Rp. 126.132.86	-10,11%

Sumber : Kabupaten Bungo Dalam Angka Tahun 2021

Data yang disajikan pada tabel 1.1 tersebut memberi gambaran bahwa diperlukan kebijakan khusus guna meningkatkan PAD dimasa pandemi covid-19 di kabupaten Bungo.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan deskripsi yang di muat dalam latar belakang maka dirumuskan pointer permasalahan adalah

1. Apakah ada perbedaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat pandemic Covid – 19
2. Kebijakan apakah yang dapat digunakan untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Muaro Bungo pada masa Pandemi Covid-19

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perbedaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat pandemic Covid - 19
2. Untuk Merumuskan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Bungo Pada Masa Covid - 19

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis : menumbuhkembangkan ilmu keuangan daerah
2. Manfaak Praktisi : Masukan bagi pemerintah kabupaten Bungo untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah akibat pandemic covid - 19.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kajian Teori**

#### **2.1.1. Perekonomian Daerah**

Perekonomian Daerah diartikan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah dimulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Bentuk ekonomi daerah dapat dilihat dengan memakai PDRB sebagai indikatornya.

#### **2.1.2. Pendapatan Asli daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan membiayai pembangunan daerah. Instrumen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim, A (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Namun kenyataan rata-rata penerimaan PAD diseluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 hanya mencapai 44,65% dari anggaran Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah tersebut masih rendah dan masih tergantung pada pemerintah pusat.

Nafsi Hartoyo (2017) menyatakan rendahnya penerimaan PAD disebabkan oleh faktor pertama, kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kedua, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah. Ketiga, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Keempat, kelemahan kualitas SDM aparatur. Kelima, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya. Keenam, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Ketujuh, sering kali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (mark up) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **2.1.2. Teori Black Swan**

*Black Swan* merupakan sebuah peristiwa yang sulit untuk dapat diprediksi atau kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut sangat kecil. Namun peristiwa tersebut akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perubahan (Taleb, 2007). Teori Black Swan sudah ada sejak abad ke-17 yang berasal dari Eropa. Black swan event memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) Merupakan suatu

peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya atau yang diperkirakan tidak dapat terjadi, (2) Memberikan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan, dan (3) Peristiwa tersebut dirasionalisasi oleh masyarakat dengan penjelasan sederhana. Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang sulit di prediksi dan juga tidak terduga, belum ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Serta adanya pandemic Covid-19 ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan seperti sektor ekonomi dan

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang komprehensif tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Hubungannya Dengan Ekonomi Daerah Kabupaten Kota Di provinsi Jambi belum didapat. Penelitian yang telah ada didapati meneliti secara parsial saja.

Astuti, H.W, dkk (2021) melakukan penelitian analisis penerimaan pajak daerah provinsi Lampung pada masa pandemic Covid – 19. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak daerah selama pandemic Covid – 19. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Lampung telah mengambil kebijakan berupa keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.

Safitra, N (2019) dengan penelitian berjudul Strategi peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di kabupaten Enrekang. Hasil penelitian memaparkan bahwa untuk peningkatan Pendapatan asli daerah maka perlu dilakukan strategi dengan memperbaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, Aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak, menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta Aspek Personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 2.3. Karangka Pikir

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka diupayakan menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah. Salah satu bentuk penerimaan daerah yaitu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Pada saat Pandemi Covid 19 ini terjadi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara teknis faktor tersebut akan berhubungan dengan instrument penerimaan PAD yang diperbolehkan menurut UU No 28 tahun 2008 yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Diduga terdapat perbedaan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat masa pandemic Covid – 19.



## **BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Sekunder dan obeservasi. Yang dimaksud dengan metode penelitian Analisis Data Sekunder adalah suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yang bersumber dari instansi terkait.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo. Untuk data sebelum masa Pandemi dibutuhkan data 2018 – 2019. Sedangkan data penerimaan pendapatan asli daerah saat pandemic covid 19 dibutuhkan data tahun 2020 – 2021.

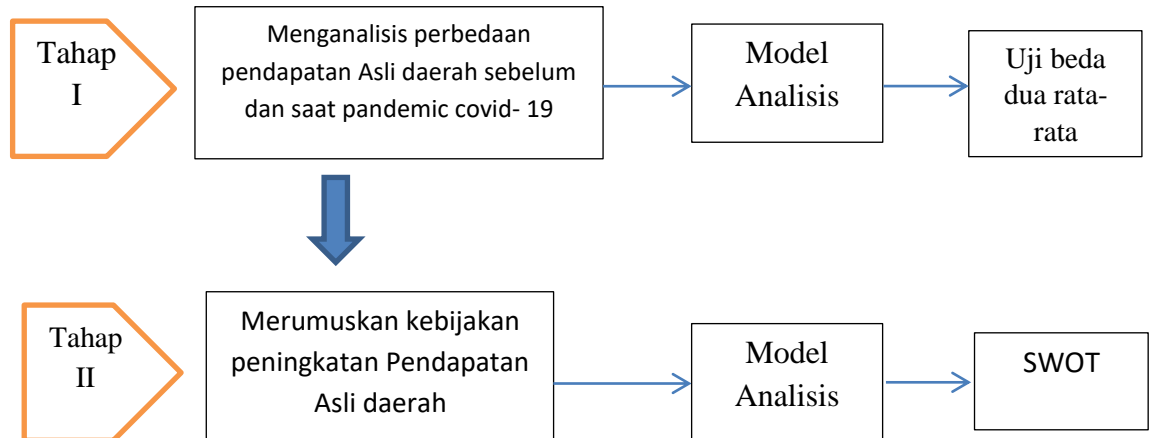
### **3.3 Tahapan Penelitian**

Penelitian kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo pada masa pandemic covid 19 akan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dengan 2 kategori tahapan kegiatan. Kedua kategori tersebut adalah:

1. Menganalisis uji beda pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemic covid - 19
2. Merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah pada saat masa pandemic Covid - 19

Hubungan setiap tahapan kegiatan dengan keluaran akan tergambar dalam Bagan Penelitian secara keseluruhan. Bagan alur tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

**Gambar 3.1. Bagan Penelitian**



### 3.5. Model Analisis Data

#### 3.5.1. Model Analisis Pertama

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu menganalisis perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan saat pandemi maka digunakan uji beda dua rata-rata. Uji beda merupakan sebuah teori dalam statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan (Paired Sample T-test). Sebelum dilakukan uji beda, data yang akan diuji dilakukan uji normalitas terlebih dahulu.

$$t = \frac{\text{rerata sampel pertama} - \text{rerata sampel kedua}}{\text{standar error perbedaan kedua sampel}}$$

Kriteria pengambilan keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  diterima apabila:  $\text{Sig.} > 0,05$  yang berarti tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan saat Pandemic Covid 19.
2.  $H_a$  diterima apabila:  $\text{Sig.} \leq 0,05$  yang berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata antara sebelum dan saat Pandemic Covid 19

### **3.5.2. Model Analisis Kedua**

Untuk merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bungo pada masa pandemic Covid – 19 maka digunakan analisis kebijakan komperatif. Model analisis kebijakan komperatif adalah model yang membandingkan kebijakan yang diambil sebelum dan saat terjadinya Covid 19 khususnya kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo Sebelum Dan Saat Pandemic Covid – 19**

Adanya pengumuman oleh World Health Organization adanya virus yang melanda di tahun 2019 sebagai bencana dunia memberikan dampak terhadap perekonomian. Perubahan perekonomian ini juga mengakibatkan melemahnya sektor ekonomi dan berdampak pula terjadinya penurunan pendapatan asli daerah diberbagai daerah do Indonesia.

Kondisi ini juga terlihat pada kabupaten Bungo dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo sebelum Covid 19 mengalami peningkatan sebesar 4,84 % untuk kondisi tahun 2018 hingga 2019, namun setelah terjadinya Covid 19 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar -10,12 % untuk tahun 2019 hingga tahun 2020. Gambaran data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo sebelum dan saat Covid 19 perubahannya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah ( milyar Rupiah)</b>	<b>% Kenaikan/ penurunan</b>	<b>Keterangan</b>
1	2018	133,85	-	Sebelum covid 19
2	2019	140,33	+ 4,84	Sebelum covid 19
3	2020	126,13	-10,12	Saat covid 19
4	2021	198,75	+57,58	Saat covid 10

Sumber : Data diolah, 2022

Tabel di atas memperlihatkan angka pendapatan asli daerah kabupaten Bungo sebelum Covid sebesar 130,33 milyar untuk tahun 2010. Selanjutnya dapat juga dilihat pendapatan asli daerah besarannya mengalami penurunan sebesar 126,13 milyar. Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo pada tahun 2021

mengalami peningkatan kembali secara drastic yaitu sebesar 57,58 %. Secara absolut pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 126,13 milyar lalu meningkat pada tahun 2021 sebesar 198,75 milyar. Secara statistic, untuk menguji perbedaan pendapatan asli daerah sebelum dan saat covid dilakukan pengujian uji beda melalui uji Paired sample test. Hasil pengujian Paired sample test diperlihatkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2. Paired Samples Test**

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	sebelum – saat	-25.35000	46.76804	33.07000	-445.54419	394.84419	-.767	1	.584

Dari hasil uji Paired Samples Test merupakan uji beda yang diambil dari periode pengamatan yang berbeda dengan subjek yang pasangkan. Tabel diatas memperlihatkan nilai t hitung sebesar -0,767 dengan Sig. sebesar 0,584. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitasnya (Sig). Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai Sig. sebesar  $0,584 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima, yaitu tidak terdapat perbedaan PAD Kabupaten Bungo antara sebelum Pandemi Covid dengan Saat terjadinya Pandemi Covid.

Secara absolut pendapatan asli daerah untuk sebelum dan saat covid terjadi perbedaan yaitu dari 140,33 milyar pada tahun 2019 lalu turun menjadi 126,13 milyar pada tahun 2020. Ini berarti terjadi penurunan pendatan asli daerah kabupaten Bungo sebesar 10,12%.

Secara uji statistic menggunakan uji Paired sample test tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat terjadi Covid 19. Hal ini disebabkan setelah

tahun 2021 pendapatan asli daerah kabupaten Bungo kembali mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 57,58%. Secara relative angka tersebut cukup besar sekali dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 10,12%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Yuliana, Et. Al, 2021) bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan penerimaan pajak asli daerah pada saat Covid 19 di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian yang sama juga terjadi di provinsi Yogyakarta yang dilakukan oleh Aji. W.A dan Pratiwi (2022)

#### **4.2. Kebijakan untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo pada masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid 19 berdampak terhadap penurunan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo pada tahun 2020. Untuk menganalisis kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bungo sebelum dan saat terjadi Covid 19 maka perlu dilakukan kebijakan komperatif sebagai upaya mendorong terjadinya peningkatan asli daerah kabupaten Bungo.

Sebelum dilakukan analisa komperatif maka perlu dicermati kompopnen dari pendapatan asli daerah kabupaten Bungo. Ada 3 (tiga) komponen asli daerah yaitu :

1. Pajak dan retribusi daerah
2. Laba BUMD
3. Hasil pengelolaan Aset daerah

Dari ketiga komponen tersebut penyumbang terbesar adalah pajak dan retribusi daerah. Sedangkan laba BUMD dan hasil pengelolaan asset daerah masih penyumbang terkecil terhadap kabupaten Bungo. Oleh karena itu komperatif kebijakan lebih tepat ditujukan kepada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Bungo.

Untuk memperlihatkan komperatif peningkatan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah maka digunakan tabel komperatif berikut ini.

4.3.Tabel komperatif kebijakan sebelum dan saat Covid 19

No	Kondisi	Kebijakan
1	Sebelum Covid 19	Ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan Pendapatan asli daerah
2	Saat Covid 19	Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan Pendapatan asli daerah

Tabel diatas memperlihatkan bahwa kebijakan sebelum Covid 19 lebih fokus pada perluasan objek pajak dan retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah sedangkan kebijakan saat Covid hanya bersifat intensifikasi atau peningkatan jumlah penerimaan tanpa perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan karena saat Covid 19 tidak mungkin dilakukan perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Pada saat terjadinya Covid 19 dimasyarakat terjadi penurunan wajib pajak dan retribusi daerah akibat covid 19.

Untuk mengatasi penurunan pajak maka pemerintah kabupaten Bungo dapat melakukan kebijakan berupa menghapuskan denda, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban seperti dilakukan dengan mendayagunakan Samsat Induk, Samsat Keliling, Samsat Malam, aplikasi Sakpole melalui penganggaran. Selain itu pemerintah kabupaten Bungo juga dapat melakukan dengan memberikan stimulus pajak daerah kepada masyarakat, berupa bebas denda administrasi, dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil butir simpulan diantaranya adalah :

1. Secara absolut tidak terjadi perbedaan yang signifikan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan saat terjadinya Covid 19 di Kabupaten Bungo
2. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi untuk peningkatan Pendapatan asli daerah

### **5.2. Saran**

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bungo maka dapat disarankan untuk melakukan antara lain :

1. Meningkatkan daya tarik dan minat orang untuk membayar pajak
2. BUMD kabupaten Bungo melakukan efisiensi dan pengelolaan secara profesionalisme agar mendapatkan laba
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk Pengelolaan asset yang produktif agar mendapatkan pajak daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W.A dan Pratiwi, D.I (2022). Analisis Perbedaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebelum dan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Yogyakarta Tahun 2020. *Ekonomica. Vol X No 1*.
- Astuti, H.W., Murniati., Haninum dan Nurdiawansyah. (2021). Analisis Penerimaan Pajak daerah Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Visionist Vol. 10 Nomor 1*.
- Halim, A (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Lutfiyah, (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol 4 No. 2
- Lypsey (1997). Pengantar Makro Ekonomi. Jilid dua. Bina Rupa. Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, A.I. - Militina, T & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh Investasi Swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan manajemen*. Vo. 13 No. 2
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta
- Paramasivan, C. P & Mari S. (2013). Progress and Performance of Micro, Small and Medium Entreprises in India. *International Journal of Manajement Studies*, 2(4).
- Setiawan, B. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Jambi.
- Sutha, (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Yayasan Sad Satria Bakhti, Jakarta
- Taleb, N. N. (2007). Black swans and the domains of statistics. *The american statistician*, 61(3), 198-200.